

# **RENCANA KERJA TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 02 Agustus 2024  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,



**M. ARSUL S.P., M.Si**

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19731123 199302 1 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	46
3.3 Program dan Kegiatan .....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	59
BAB V PENUTUP .....	63

**DAFTAR TABEL**

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	11
Tabel T-C 30 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.....	30
Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	32
Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis, perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026.

telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2025 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

**1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;

- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- t) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang

daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- u) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
- w) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- x) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
- y) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD Tahun 2025 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RAPBD Tahun 2025,
- b) Menjadi penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini terdiri atas:

- ❖ Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

❖ Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

❖ Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

❖ Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri atas:

❖ Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  - 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
  - 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- ❖ Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- Jenis indikator yang dikaji, dja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- ❖ Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:
- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
  - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- ❖ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
  - 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  - 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  - 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- ❖ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

  - 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  - 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH , terdiri atas:

- ❖ Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- ❖ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

❖ Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
  - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
  - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  - f. Pengembangan daerah terisolir,
  - g. Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Misal:
  - a. Jumlah Program dan kegiatan
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dana apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2022 dan 2023 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2025

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2023, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin. Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peraangkat daerah.
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat
- ✓ Administrasi Umum Perangkat
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebebangsaan
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja renja pada tahun 2022 dikarenakan realisasi kinerja pada beberapa kegiatan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan pada tahun berjalan

seperti pada kegiatan: pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan target-target yang tidak tercapai merupakan program kegiatan rutin.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan besaran kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**TABEL T.C. 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	100 %	100	100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	100	100	100	100%	100		
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	6	2	2	100%	2	10	40%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1	1	1	100%	1	3	33%

**RENCANA KERJA AKHIR 2025**  
*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2	Dok	2	2	2	100%	2	6	33%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	1	2	2	100%	1	1	100%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2	Dok	2	2	2	100%	2	6	33%
	2. KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	org/bln	24	14	14	100%	14	52	27%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	4	4	4	100%	4	12	33%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2	1	1	100%	0	3	33%
	3. KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%					100	100	
	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	100	34	34	100%	20	154	16%
	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126	Laporan	150	120	90		120	360	35%
	4. KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%							
	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	10	Paket	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Paket	0	0	0	0%	0	0	0%

**RENCANA KERJA AKHIR 2025**  
*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

5.	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%						0	
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130	Laporan	395	220	220	100%	120	735	18%
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24	12	12	100%	12	48	25%
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	24	12	12	100%	12	48	25%
6.	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100	%						0	
	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	14	11	11	100%	11	36	31%
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	12	11	4	36%	11	27	41%
	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	15	24	22	92%	15	52	29%
	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	Unit	1	1	0	0%	0	1	100%
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	50	%							
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa	50	%							

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Porgram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	3	Dok	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	3	dok	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGUATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70	orang	0	630	60	10%	0	60	86%
	SUB KEGUATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70	orang	0	630	50	8%	50	100	143%
	SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	Lap	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	6	Lap	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	90	orang	0	0	0	0%	70	70	78%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	100	%							

**RENCANA KERJA AKHIR 2025**  
*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	1. KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula	100	%								
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	Dok	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11	Dok	0	11	11	100%	13	24	46%	
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	44	orang	0	44	44	100%	0	44	100%	
	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan</b>	80	%								
	1. KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	80	%								

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	140	Orang	260	0	0	0%	0	260	54%
	SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	18	Orang	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	12	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%
	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya</b>	<b>Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	95	%							
	1. KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	95	%							
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	Dok	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	Dok	0	0	0	0%	0	0	0%

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	630	Orang	0	630	150	24%	630	780	124%
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi, di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25	Orang	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Laporan	0	2	2	100%	3	5	167%
	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah</b>	100	%							
1.	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100	%							
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Dok	0	0	0	0%	0	0	0%

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanana Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan	240	Orang	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Dok	24	12	12	100%	12	48	25%

Pangkajene Sidenreng,      Juni 2024  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**M. ARRSUL, S.IP., M.Si**  
NIP. 19731123 199302 1 002

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

### (1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;

- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Merencanakan Program Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- j. Mengikuti rapat-rapat terikat urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- l. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- n. menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- o. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ideology, wawasan kebangsaan karakter bangsa;
- p. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang politik dalam negeri;
- q. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- r. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### (2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan urusan urusan rumah tangga badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonperintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secretariat;
- v. menilai kinerja pegawai

- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### (3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyipian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- o. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- q. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- r. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- s. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- t. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- u. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- v. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- w. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

#### (4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesatuan bangsa.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

- antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa;
  - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kesatuan bangsa perumusan kebijakan; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL T-C.30**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi karakter Kebangsaan			-	50%	75%	90%	-				

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Beberapa isu-isu penting yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

#### **A. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat**

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marjinal,
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang ormas,
4. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap ormas.

#### **B. Bidang Kesatuan Bangsa**

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg
3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
4. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik
5. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>4.745.836.973</b>					<b>4.745.836.973</b>	
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>4.745.836.973</b>					<b>4.745.836.973</b>	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.485.836.973</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.485.836.973</b>	
	1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	12.120.000	1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	12.120.000	
	1.1 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	2.120.000	1.1 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	2.120.000	

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

1.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.000.000	1.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.000.000
1.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 dok	2.000.000	1.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 dok	2.000.000
1.4	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2.000.000	1.4	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2.000.000
1.5	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok	3.000.000	1.5	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok	3.000.000
2	<b>KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.898.586.590</b>	2	<b>KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b> <b>100</b>	<b>1.898.586.590</b>
2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Oran g/bln	1.891.786.590	2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Orang/bln	1.891.786.590
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 lap	6.000.000	2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 lap	6.000.000

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

2.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	800.000	2.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	800.000
3	<b>KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>205.000.000</b>	3	<b>KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>205.000.000</b>
3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5.000.000	3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5.000.000
3.3	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	200.000.000	3.3	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	200.000.000
4	<b>KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>75.000.000</b>	4	<b>KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>75.000.000</b>
4.1	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	8 Paket	15.000.000	4.1	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	8 Paket	15.000.000
4.2	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Paket	60.000.000	4.2	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Paket	60.000.000
5	<b>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>177.366.383</b>	5	<b>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>177.366.383</b>
5.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Laporan	4.300.000	5.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Laporan	4.300.000
5.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	5.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

5.3	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	143.066.383	5.3	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	143.066.383
<b>6</b>	<b>KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>117.764.000</b>	<b>6</b>	<b>KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>117.764.000</b>
6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	75.000.000	6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	75.000.000
6.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	6.264.000	6.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	6.264.000
6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	16.500.000	6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	16.500.000
6.4	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	unit	20.000.000	6.4	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	unit	20.000.000
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan</b>		<b>Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>365.000.000</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan</b>		<b>Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>365.000.000</b>

<p><b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b></p>	<p><b>Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa</b></p>	<p>50 %</p>	<p>365.000.000</p>	<p><b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b></p>	<p><b>Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa</b></p>	<p>50 %</p>	<p>365.000.000</p>
<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Dokumen Pogram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun</p>	<p>3 dokumen</p>	<p>-</p>	<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Dokumen Pogram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun</p>	<p>3 dokumen</p>	<p>-</p>
<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun</p>	<p>3 dokumen</p>	<p>-</p>	<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun</p>	<p>3 dokumen</p>	<p>-</p>
<p>SUB KEGUATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>60 Orang</p>	<p>-</p>	<p>SUB KEGUATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>60 Orang</p>	<p>-</p>

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

SUB KEGUATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 orang	-	SUB KEGUATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 orang	-
SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	-	SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	-
SUB KEGIATAN Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	5 laporan	-	SUB KEGIATAN Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	5 laporan	-
SUB KEGIATAN Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	80 orang	365.000.000	SUB KEGIATAN Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	80 orang	365.000.000
<b>PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	100 %	900.000.000	<b>PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	100 %	900.000.000

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

<p><b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b></p>	<p><b>Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda</b></p>	<p>100 %</p>	<p>900.000.000</p>	<p>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda</p>	<p>100 %</p>	<p>900.000.000</p>
<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>4 Dokumen</p>	<p>0</p>	<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>4 Dokumen</p>	<p>0</p>
<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>11 dokumen</p>	<p>900.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>11 dokumen</p>	<p>900.000.000</p>

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	44 Orang	0		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	44 Orang	0
	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan</b>		<b>Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan</b>	80 %	20.000.000		<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan</b>		<b>Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan</b>	80 %	20.000.000
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>		<b>Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat</b>	80 %	20.000.000		KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	80 %	20.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	135 Orang	-		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	135 Orang	0

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	16 orang	-	SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	16 orang	0
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	12 Laporan	20.000.000	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	12 Laporan	20.000.000
	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya</b>		<b>Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	90 %	275.000.000	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya</b>		<b>Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	90 %	275.000.000
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>		<b>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	90 %	275.000.000	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>		<b>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	90 %	275.000.000
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5 dokumen	-	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5 dokumen	0

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5 dokumen	-		SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5 dokumen	0
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	630 Orang	150.000.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	630 Orang	150.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 Orang	-		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 Orang	0

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	125.000.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	125.000.000	
	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah</b>	100 %	700.000.000		<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah</b>	100 %	700.000.000	
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial</b>	100 %	700.000.000		<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial</b>	100 %	700.000.000	
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	0	

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	240 orang	50.000.000	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	240 orang	50.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	-	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	0
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	650.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	650.000.000

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan masyarakat di peroleh melalui kegiatan musrenbang dimulai pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Musrenbang ini berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Program dan kegiatan tersebut yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 yang sejalan dengan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah:

1. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
2. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024: "Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman".

Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Konflik dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pengawaasan dan pemberdayaan ormas.
4. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis”, dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan

### **3.3 Program dan Kegiatan**

untuk target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat dirumuskan Rencana Kerja sebanyak 5(Lima) program, 9 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota
  1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah  
Sub Kegiatan :
    - a) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
    - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
    - d) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
    - e) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah  
Sub Kegiatan :
    - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - 3) Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

➤ Program Penguatan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan: Peumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaanbidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan

Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologin wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
2. Pembinaan terhadap aktivitaskepaskibrakaan dan purnapaskibraka
3. Pembentukan paskibraka

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Pemantauan Situasi Budaya Politik

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

### Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di butuhkan pada tahun 2025 untuk Belanja sebesar Rp. 4.745.836.973, dan diperkirakan pada tahun 2026 sebesar Rp. 4.837.834.876 dimana sumber pendanaanya bersumber dari APBD II Kab. Sidenreng Rappang.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2025 dan perkiraan maju pada tahun 2026 dapat di uraikan pada tabel berikut:

**TABEL T-C 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>4.745.836.973,00</b>					<b>4.837.834.876,00</b>
	<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>4.681.536.973,00</b>					<b>4.811.434.876,00</b>
	<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>4.681.536.973,00</b>					<b>4.811.434.876,00</b>
1,	<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>2.421.536.973,00</b>				<b>100 %</b>	<b>1.893.104.376,00</b>
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	12.120.000,00			-	100 %	12.322.000,00
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	2.000.000,00
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	3.000.000,00
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	2.000.000,00

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	3.000.000,00
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	2.120.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	2.322.000,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	1.898.586.590,00			-	100 %	1.612.580.376,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	252 Orang/bulan	1.891.786.590,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	18/14 Orang/bulan	1.607.080.376,00
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	800.000,00
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	4.700.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	205.000.000,00			-	100 %	21.300.000,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	25 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	25 Paket	1.100.000,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	125 Laporan	200.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	126 Laporan	20.200.000,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	15.000.000,00			Kesbangpol Sidrap	100 %	15.000.000,00
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	8 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kesbangpol Sidrap	10 Unit	15.000.000,00

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	173.066.383,00			-	100 %	142.638.000,00
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	30.000.000,00
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	143.066.383,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	112.638.000,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	117.764.000,00			-	100 %	89.264.000,00
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	11 Unit	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	11 Unit	60.000.000,00
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	11 Unit	6.264.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	11 Unit	6.264.000,00
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	10.000.000,00
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	15 Unit	16.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15 Unit	13.000.000,00
2,	<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b><i>Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</i></b>	<b>75 %</b>	<b>365.000.000,00</b>				<b>75 %</b>	<b>645.040.000,00</b>
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</i>	75.00 %	365.000.000,00			-	90.00 %	645.040.000,00

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>	3 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	59.000.000,00
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>	3 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	64.000.000,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	60 Orang	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	70 Orang	39.000.000,00
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	60 Orang	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	70 Orang	65.000.000,00
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	3 Laporan	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	7.000.000,00
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>	5 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Dokumen	50.197.000,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	<i>Jumlah Paskibraka</i>	80 Orang	365.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	90 Orang	360.843.000,00

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

3,	8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<i>Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik</i>	100 %	900.000.000,00				100 %	1.107.900.000,00
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula</i>	100 %	900.000.000,00			-	100 %	1.107.900.000,00
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	4 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Dokumen	127.000.000,00
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	11 Dokumen	900.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	11 Dokumen	850.900.000,00

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	44 Orang	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	44 Orang	130.000.000,00
4,	<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b><i>Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan</i></b>	<b>87 %</b>	<b>20.000.000,00</b>				<b>87 %</b>	<b>115.200.000,00</b>
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	80 %	20.000.000,00			-	80 %	115.200.000,00
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	135 Orang	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	140 Orang	60.000.000,00
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	16 Orang	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	18 Orang	35.000.000,00
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	20.200.000,00
5,	<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b><i>Persentase Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya</i></b>	<b>90 %</b>	<b>275.000.000,00</b>				<b>90 %</b>	<b>302.125.500,00</b>

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</i>	90 %	275.000.000,00			-	95 %	302.125.500,00
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>	5 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	0 Dokumen	0,00
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>	5 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	0 Dokumen	0,00
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	630 Orang	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	630 Orang	202.125.500,00
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	25 Orang	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	25 Orang	60.000.000,00
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	3 Laporan	125.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	40.000.000,00
6,	<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b><i>Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah</i></b>	<b>100 %</b>	<b>700.000.000,00</b>				<b>100 %</b>	<b>748.065.000,00</b>

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	100 %	700.000.000,00			-	100 %	748.065.000,00
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	1 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	15.000.000,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	240 Orang	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	240 Orang	53.065.000,00
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	12 Laporan	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	25.000.000,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	655.000.000,00
<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>			<b>64.300.000,00</b>					<b>26.400.000,00</b>
<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>64.300.000,00</b>					<b>26.400.000,00</b>
1,	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>64.300.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>26.400.000,00</b>
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	60.000.000,00		-	100 %	25.000.000,00

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	60.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8 Unit	25.000.000,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	4.300.000,00			-	100 %	1.400.000,00
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	130 Laporan	4.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	140 Laporan	1.400.000,00
<b>J U M L A H</b>				<b>4.745.836.973,00</b>					<b>4.837.834.876,00</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**Program dan kegiatan**

Pelaksanaan program/kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Faktor pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2025 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenrang Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan pembangunan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian Pelaksanaan Program Kegiatan, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestrian SKPD</li> </ol>
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Mebel</li> <li>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum</li> </ol>
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol>
2	Program Penguatan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</li> <li>2. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan</li> </ol>

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

			Purnapaskibraka 3. Pembentukan Paskibraka
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Pemantauan Situasi Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

## RENCANA KERJA AKHIR 2025

*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	dan Budaya	Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. 2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB V**  
**P E N U T U P**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2024 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: “**Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis**”.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 yaitu: meningkatkan peran Konflik dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025.

Semoga penyusunan renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja.

Pangkajene Sidenreng, 02 Agustus 2024  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,



**M. ARSUL, S.IP., M.Si**

Panglima Pemula Utama Muda

NIP : 19731123 199302 1 002